

KESERASIAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN



Saat ini, walaupun secara konsep kita harus menggunakan pola berfikir ekosentris (holistik) dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun dalam kenyataannya secara de facto kita masih mempraktekkan etika anthroposentris dalam pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan . Etika anthroposentris, dimana posisi manusia berada di luar lingkungan hidupnya/ekosistem tempat hidupnya, telah memposisikan manusia untuk memanfaatkan SDA sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya tanpa menghiraukan kerusakan lingkungan/pencemaran yang ditimbulkannya. Penerapan etika ini secara empiris bisa menimbulkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup, tetapi kondisi lingkungan dibiarkan menurun kualitasnya secara perlahan ataupun secara drastis yang menyebabkan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan tidak terlanjutkan.

SDA-SDA beserta lingkungannya di planet bumi ini tidak berdiri sendiri tetapi mereka satu sama lain saling berhubungan timbal balik dan saling mempengaruhi melalui transaksi materi, energi dan informasi untuk menjalin suatu sistem kehidupan yang disebut sistem ekologi atau ekosistem yang kompleks. Pendayagunaan suatu SDA akan menimbulkan gangguan terhadap SDA-SDA lainnya melalui gangguan-gangguan terhadap siklus materi dan transformasi energi yang menghubungkan pertalian diantara mereka. Harapan kita gangguan terhadap ekosistem/lingkungan hidup dimana SDA itu berada tidak menimbulkan krisis lingkungan, tetapi gangguan tersebut masih memberi kesempatan kepada lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem untuk mencari keseimbangan yang baru sehingga daya lenting/daya dukung lingkungan masih bisa terlanjutkan untuk mendukung berbagai kegiatan pemanfaatan SDA yang dijalankan.

Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dunia saat ini tentu saja menimbulkan terus meningkatnya kebutuhan untuk menopang keberlangsungan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk tersebut dengan cara mengintensifkan industrialisasi di berbagai sektor. Implikasinya, manusia menuntut lingkungan lebih berat dengan cara mengeksploitasi SDA-SDA yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik terhadap renewable resources maupun non-renewable resources. Hal ini diperberat dengan faktor sosial budaya masyarakat dunia saat ini yang cenderung bersifat konsumtif /boros sumberdaya, hedonisme, tidak berperilaku hidup sederhana, bersifat materialistis sebagai efek eksternalitas dari perilaku sistem perekonomian kapitalis liberalisme. Kerusakan SDA berikut lingkungannya terjadi secara masif di berbagai belahan dunia ini, sehingga fenomena ini telah mengakibatkan rusaknya beragam sistem penyangga kehidupan, seperti hutan, dimana-mana yang menimbulkan goyangan terhadap tatanan siklus materi dan transformasi energi dalam suatu sistem kehidupan dalam skala global.

Kerusakan hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan telah menyebabkan berfluktuasinya rejim debit air sungai (banjir pada saat musim penghujan dan kekeringan pada saat musim kemarau); erosi tanah yang menurunkan produktivitas lahan dan menimbulkan sedimentasi di hilir, diantaranya mengakibatkan

pendangkalan waduk yang memperpendek umur pakainya; mengurangi penyerapan karbondioksida (CO₂) dan produksi oksigen (O₂); mengurangi produksi karbohidrat (sumber energi bagi herbivora) yang berarti mengurangi sumber energi bagi konsumen. Fenomena ini akan mengurangi keanekaragaman hayati (gen, jenis, ekosistem) yang penting untuk memelihara kemantapan suatu ekosistem terhadap gangguan dan ikut menjamin tetap tersedianya pilihan SDA untuk dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Kondisi ini diperberat dengan praktek-praktek ekstraksi SDA yang kurang ramah lingkungan (pembakaran lahan, konversi mangrove menjadi tambak, konversi hutan menjadi lahan pertanian,dll) dan meningkatnya laju industrialisasi telah mengakibatkan global warming yang memicu terjadinya perubahan iklim global yang mengancam kelestarian SDA-SDA penunjang kehidupan berbagai mahluk hidup.



Terancamnya kelestarian SDA-SDA tersebut akan menyebabkan ketidakberhasilan program pembangunan berkelanjutan (sustainable development), karena SDA-SDA yang ada merupakan modal utama pembangunan. Fenomena tersebut akan meningkatkan tingkat kemiskinan penduduk yang pada gilirannya akan lebih meningkatkan kemerosotan/ kerusakan SDA. Di pihak lain, tata kelola kelembagaan pengurusan SDA belum efektif, begitu pula peraturan perundangan yang belum memadai dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam praktek pengelolaan

SDA masih lemah, sehingga azas keadilan dan pemerataan dalam pendayagunaan sumberdaya alam belum terwujud. Dengan demikian, hal tersebut akan mengancam terhadap ketersediaan pangan, energi dan obat-obatan bagi masyarakat.

Dengan adanya perencanaan sejak awal dari pengelolaan lingkungan, seperti harus disunturnya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dalam pemanfaatan SDA dan dilakukannya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk memastikan diterapkannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam program pembangunan, juga sebagai dasar penyusunan tata ruang wilayah, maka diharapkan pengelolaan pembangunan dapat merupakan penopang pembangunan untuk meningkatkan nilai SDA dan meningkatkan manfaat lingkungan untuk kesejahteraan penduduk dalam kondisi lingkungan yang semakin baik.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan konsep pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan ke dalam program dan proses pembangunan. Pembangunan harus memperhatikan segala aspek mulai dari potensi yang dimiliki daerah setempat, adat istiadat kebiasaan hidup masyarakat sekitar kegiatan pembangunan, ataupun kepercayaan yang dianut. Konsep pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan sustainable development adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Rumusan pembangunan berkelanjutan memuat 2 (dua) gagasan pokok, yaitu gagasan "kebutuhan" yaitu kebutuhan esensial untuk keberlanjutan manusia, dan gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat 3 (tiga) pilar utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan prinsip pembangunan berkelanjutan secara detail dapat ditinjau dari sisi prinsip lingkungan/ekologi dan prinsip sosio-politik berdasarkan dari hambatan lingkungan/ekologi dan dari kriteria sosio-politik. Dimensi lingkungan dalam pembangunan adalah menciptakan keadilan intern generasi dan menjaga

keselarasana hubungan manusia dengan lingkungan. Dimensi ini sangat penting karena akan berkaitan dengan dampak pembangunan terhadap lingkungan, baik dampak negatif ataupun dampak positif.

DIMENSI DAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN



Dimensi lingkungan dalam pembangunan menurut Saptari (2009) adalah:

1. Menciptakan keadilan intern generasi

Dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk perbaikan kualitas hidup harus berlandaskan pada pertimbangan bahwa dalam suatu kurun waktu, sumber daya alam dan lingkungan dimanfaatkan oleh lebih dari satu kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan. Pendekatan polluter pays principle diterapkan untuk menjembatani perbedaan kepentingan dari para pengguna sumber daya alam, baik dalam fungsi penerima bahan baku ataupun penerima limbah.

2. Menjaga keselarasana hubungan manusia dengan lingkungan

Dalam melaksanakan upaya pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan melalui pendekatan polluter pays principle digunakan tolok ukur misalnya, baku mutu lingkungan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan adaptasi lingkungan terhadap gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Pendekatan ini selain dapat mengatasi konflik dalam masyarakat, juga

akan menciptakan hubungan yang selaras antara manusia dan lingkungan. Prinsip polluter pays principle adalah pendekatan yang diterapkan sebagai kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Prinsipnya yaitu siapa yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran pada komponen lingkungan, harus melakukan upaya untuk menebusnya/membayarnya. Penerapan prinsip ini terkait dengan penerapan peraturan mengenai baku mutu lingkungan sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan pencemaran lingkungan. Yang harus diperhatikan pula adalah fungsi lingkungan dalam kegiatan pembangunan. Fungsi lingkungan dalam kegiatan pembangunan merupakan penyedia sumber daya (terbarukan maupun tidak terbarukan) yang dapat berupa deposit sumber daya alam, air, vegetasi dan hewan yang dapat digunakan sebagai bahan baku kegiatan produksi, maupun ruang untuk berlangsungnya suatu produksi. Selain itu, lingkungan juga dapat merupakan tempat penampungan bagi buangan atau limbah dalam proses kegiatan pembangunan. Sebagai contoh adalah lingkungan udara yang dapat menerima buangan debu pada kegiatan industri semen, aliran sungai yang menerima limbah cair dari pabrik tekstil dan sebagainya. Berdasarkan fungsi lingkungan tersebut, maka dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus dilaksanakan dengan adanya kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan lingkungan di dalamnya. Dampak negatif dari kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup (fisik, biologi, kimia dan sosbud baik skala lokal, nasional maupun global dan akan mengancam kalangsungan hidup manusia. Sebagai contoh aktivitas pembangunan saat ini yang berdampak terhadap keseimbangan ekosistem antara lain berupa:

- a. rusaknya berbagai sistem pendukung peri kehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial-budaya.
- b. instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan.
- c. berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian, maka permasalahan lingkungan yang mungkin timbul antara lain:

- a. menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. terjadinya penyusutan sumberdaya alam dan lingkungan.

- c. permasalahan lingkungan buatan
- d. penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah.
- e. masalah pemanfaatan dan pengurusan sumber daya alam (hutan, tanah, sumberdaya air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya pesisir dan laut)
- f. terjadinya bencana alam
- g. pencemaran lingkungan Terpenuhinya konsepsi pembangunan yang berkelanjutan memerlukan nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan yang terdiri dari butir-butir sebagai berikut.

1. Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

2. Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan dalam pembangunan perlu memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai fungsinya. Daya dukung lingkungan menjadi kendala dalam pengambilan keputusan dan prinsip ini perlu dilakukan secara kontinyu dan konsekuen.

3. Pemanfaatan sumber daya alam tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi. Pemanfaatan sumber daya alam terpulihkan perlu mempertahankan daya pemulihannya. 4. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Oleh karenanya, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan informasi lingkungan yang benar, lengkap dan mutakhir. 5. Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan daripada usaha penanggulangan dan pemulihan. 6. Kualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu dihindari bila sampai terjadi pencemaran dan perusakan

lingkungan, maka diadakan penanggulangan dan pemulihan dengan tanggung jawab pada pihak yang menyebabkannya.

Dengan demikian, dalam implementasinya, kegiatan pembangunan harus benar-benar memperhatikan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Aturan dan kebijakan-kebijakan lingkungan harus ditaati dengan baik.

